

Proposal Hibah Skala Kecil

RIT-CEPF Wallacea Biodiversity Hotspot

Informasi Organisasi

Nama Organisasi:

SIKAP Institute

Kategori Organisasi:

- Organisasi Masyarakat (Agama/Pemuda/Parpol/Perempuan/Veteran)
- Organisasi Basis (Kel. Tani/Nelayan/Pengelola Hutan/Masyarakat Adat/Koperasi)
- LSM/NGO Lingkungan Hidup/Konservasi
- LSM/NGO Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat
- Organisasi Sosial/Kesehatan Masyarakat
- Lembaga Advokasi/Bantuan Hukum
- Lembaga Pendidikan/Penyuluh/Penyadaran Masyarakat
- Organisasi Profesional/Kelompok Intelektual
- Lembaga Penelitian/Kajian/Universitas
- Bagian dari perusahaan yang bergerak untuk kepedulian sosial dan lingkungan (CSR)
- Media

Nama Penanggung Jawab Organisasi:

Muhamad Akib

Nama Koordinator Proyek:

Diatmoko Saputra

Alamat Email Organisasi:

sikapsyndicate@gmail.com

Alamat Organisasi :

Jl. Nusa Kambangan No. 3 Kel. Lolu utara, Palu 94111

No Telepon Organisasi :

0451 - 4012304

No Fax Organisasi (jika ada) :

Website Organisasi (jika ada) :

Jumlah Staf tetap:

- a. Laki-laki : 7 orang
b. Perempuan : 3 orang

Akte Pendirian Organisasi:

Lengkapi dengan copy 1 rangkap jika telah memiliki

- Ada
 Tidak

Sejarah, Visi dan misi Organisasi:

Jelaskan secara singkat tentang sejarah dan misi organisasi anda, pengalaman yang relevan dengan proyek yang diusulkan berikut nama donor dan jumlah anggaran yang dikelola, maksimal 250 kata.

SIKAP merupakan singkatan dari Studi Informasi dan Komunikasi Publik yang berdiri sejak tahun 2005, Pendirian SIKAP Institute didasari salah satunya ialah karena Ketiadaan transparansi telah menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan merugikan masyarakat. Ketidaktransparanan telah menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, menumbuhkan ketidakadilan, dan membuat ketidakberdayaan hukum dan perundang-undangan. Ketiadaan transparansi juga telah menyuburkan praktek-praktek korupsi, dan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan di sektor publik, sektor swasta, maupun kehidupan masyarakat yang lebih luas. Disadari bahwa proses mewujudkan masyarakat yang transparan memerlukan komitmen yang kuat dari semua lapisan masyarakat. Proses ini perlu secepatnya dimulai dan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan sektor-sektor yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan publik.

VISI

Menjadi Lembaga Yang Konsisten Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Dan Masyarakat Yang Demokratis Dan Berkeadilan

MISI

- 1. Mendorong Terjadinya Peningkatan Apresiasi Kritis Ditingkat Masyarakat Terhadap Berbagai Kondisi Politik, Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Dan Sosiokultural Di Indonesia Khususnya Di Sulteng.*
- 2. Membangun Ruang Komunikasi Publik Yang Otonom, Dialogis Dan Berkelanjutan Antar Berbagai Kelompok Masyarakat Sipil Di Indonesia, Khususnya Di Sulteng*
- 3. Mempromosikan Beragam Inisiatif Lokal Menyangkut Praktek-Praktek Berdemokrasi, Kesetaraan Gender, Bermajemuk, Bersetara, Mandiri Dan Otonom*
- 4. Mempercepat Terjadinya Proses Transformasi Politik, Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Dan Sosiokultural Di Indonesia, Khususnya Di Sulteng.*
- 5. Membangun dan Mengembangkan Jejaring Informasi Dan Komunikasi Antar Berbagai Pihak Di Sulawesi Tengah*

POSISI DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Dalam menjalankan Visi dan Misi diatas, sikap institute akan menempatkan posisi dan peran strategis kelembagaan sebagai berikut :

- Fasilitasi** Memfasilitasi Berbagai Proses Komunikasi Dan Pertukaran Informasi Antar Semua Pihak
- Mediasi** Memediasi Berbagai Inisiatif Dan Kepentingan Publik Yang Berkepentingan Untuk Memajukan Proses Demokratisasi Di Berbagai Level
- Advokasi** Mendorong Pembaharuan Sistem Dan Kebijakan Pada Berbagai Level

Program/Proyek	Periode Kegiatan	Nilai Kontrak	Lembaga Mitra
Host Penyusunan RANPERDA Partisipasi dan Akuntabilitas Kota Palu	2004	Rp. 21.000.000	Koalisi Kebijakan Partisipatif – Simpul Sulteng
Konsultasi Publik RUU Pelayanan Publik Di Sulawesi Tengah	25 Mei 2006	Rp 30.034.500	YAPPIKA
Mendorong Demokratisasi Pelayanan Publik Di Kota Palu	Agustus – September 2007	Rp.24,432,000	YAPPIKA
Penyusunan Kerangka Dan Indikator Model Pro Poor Services	Juni 2006	Rp 107.626.500	BRIDGEs – UNDP
Kampanye Anti Kekerasan “Stop Violence With Peace Statement” Kota Palu	September-Desember 2007	Rp.35.000.000	Peace Trough Development – UNDP
Studi Identifikasi Dan Pemberdayaan Kapasitas Rukun Tetangga (RT)	2008	Rp. 25.000.000	BAPPEDA Kota Palu
Seri Diskusi Perbaikan Pelayanan Publik Kota Palu	2008	Rp 25.000.000	Peace Trough Development – UNDP
Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Kaum Miskin Dan Terpinggirkan Untuk Mendapatkan Akses Terhadap Program – Program Pro Rakyat Miskin Kab.Banggai Kepulauan	2008-2009	Rp. 636,030,000	LEAD – UNDP
Fasilitasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] Pada Kantor Sekretariat Pemda Kota Palu	2011	Rp. 75.000.000	Kerjasama SIKAP INSTITUTE dan Pemkot Palu
Riset Identifikasi Persepsi Dan Harapan Publik Serta Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sistem Layanan Informasi Dan Data Bagi Publik Di Sulawesi Tengah	2012	Rp. 89.000.000	Kerjasama SIKAP INSTITUTE dan AJI PALU
Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Bagi Petani Usaha Garam [PUGAR]	2012	Rp. 42.000.000	PNPM Kelautan
Fasilitasi Uji Coba Penerapan Modul PPAM di Desa Lempelero dan Desa Namo, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah	2013	Rp. 55.000.000	SIKAP INSTITUTE dan SCF
Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Melalui Peningkatan Partisipasi Publik	Oktober 2015 –	Rp.2.625.600.000	The Asia Foundation

	September 2016		Koalisi SCF SIKAP Institute, Karsa Institute. ROA, Yayasan Jambata
--	-------------------	--	--

Penilaian Kelayakan

Dana CEPF hanya dapat digunakan mendukung kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan CEPF dan tidak dapat dipergunakan dalam beberapa kegiatan tertentu.

Informasi lebih lanjut tentang Dana CEPF, silakan dilihat di website www.wallacea.org, atau menghubungi:

- email : hibah.wallacea@burung.org
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

Apakah organisasi anda berada di bawah kendali/bertanggung kepada/dibiayai oleh pemerintah?

Ya

Tidak

Apakah aktivitas di dalam proyek ini termasuk melakukan pembelian tanah?

Ya

Tidak

Apakah aktivitas dalam proyek ini akan melibatkan pemindahan atau perubahan atas suatu objek atau bangunan yang bernilai budaya (termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, situs, struktur, dan lanskap yang mengandung nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budaya lainnya)?

Ya

Tidak

Apakah proyek ini akan melibatkan pemindahan penduduk atau aktivitas lain yang termasuk dalam kategori pemindahan paksa?

Ya

Tidak

Penjelasan Proyek

Judul Proyek :

Mendorong inisiatif Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Perairan Peling Banggai melalui perencanaan Daerah Perlindungan Laut yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan di Desa Bone bone, Kabupaten Banggai Laut

Lokasi Proyek:

- a. Negara : Indonesia
- b. Provinsi : Sulawesi Tengah
- c. KBA yang terdampak : Labobo Bangkurung
- d. Kabupaten/kota : Banggai Laut
- e. Desa : Bone bone

Durasi Proyek:

Tuliskan jangka waktu perkiraan proyek Anda dalam hitungan bulan.

12 Bulan

Arahan Strategis dari Profil Ekosistem Wallacea CEPF:

- [] 1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi spesies prioritas
- [] 2. Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi
- [] 3. Mendukung pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas
- [✓] 4. Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
- [] 5. Melibatkan sektor swasta sebagai peserta aktif dalam konservasi kawasan dan koridor prioritas, di bentang alam produktif, dan di seluruh Wallacea
- [] 6. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea

Jumlah Dana yang Diusulkan:

Masukkan jumlah dana yang dimintakan kepada CEPF dalam Rupiah, dengan nilai tukar

Rp13,000/USD

Rp. 218.225.000,-

Total Dana Proyek:

Total dana proyek secara keseluruhan, termasuk di dalamnya yang diusulkan didanai oleh CEPF (dalam Rupiah)

Rp. 218.225.000,-

Anggaran Proyek:

Lampirkan rincian anggaran yang diusulkan dalam format excel seperti yang telah disediakan

Aspek Kerangka Pengaman

RIT dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan dan dokumentasi proyek jika proyek tersebut memiliki potensi untuk memicu Kerangka Pengaman (*Safeguards*).

Informasi lebih lanjut tentang aspek Kerangka Pengaman, silakan

- email : hibah.wallacea@burung.org
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

Aspek Lingkungan

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang mungkin memiliki dampak buruk terhadap lingkungan?

Ya

Tidak

Keterangan:

Berikan penjelasan mengenai dampak terhadap lingkungan dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Aspek Sosial

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang cenderung memiliki dampak buruk/negatif pada masyarakat lokal?

Ya

Tidak

Keterangan:

Berikan penjelasan mengenai dampak sosial dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Proposal

Bagian ini untuk memberikan gambaran dari konsep proyek.

A. Alasan Proyek:

Menjelaskan alasan bagi aksi konservasi (karena adanya ancaman dan atau peluang) yang ingin dilakukan dan apa yang akan terjadi jika proyek ini tidak dilaksanakan, maksimal 500 kata.

Pemerintah Daerah telah menetapkan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) melalui SK Bupati Nomor 5408 tanggal 20 September tahun 2007 dan SK Bupati Banggai Laut No. 125 Tahun 2014, namun penetapan KKLD belum mampu menekan laju kerusakan terumbu karang, lamun dan mangrove yang disebabkan keputusan KKLD belum tersosialisasi dengan baik ke pihak masyarakat dan operasionalisasi KKLD belum jalan. KKLD yang ditetapkan masih sebatas dokumen yang belum terimplementasi di tingkat lapangan.

Salah satu desa dan pesisir yang behadapan langsung dengan wilayah KKLD yang ditetapkan adalah Desa Bone bone, di Pulau Bangkurung. Desa ini memiliki garis pantai 2.5 km dan memiliki ekosistem pesisir yang lengkap. Terdapat ekosistem Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove. Populasi penduduk 203 KK dengan jumlah 702 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Bone bone bergantung hidup pada pertanian dan perikanan tangkap. Di sektor pertanian, pengolahan lahan dengan memanfaatkan sebagian dari total daratan desa seluas 31,34 km² dengan berbagai jenis komoditas utama seperti Jambu Mente, Cengkeh dan Kelapa.

Untuk mendukung penghidupan masyarakat, usaha perikanan tangkap juga menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat desa. Biasanya, masyarakat akan kembali mengolah perikanan tangkap saat pasca panen dan musim Paceklik tiba. Pada awalnya, keseimbangan antara penghasilan pertanian dan perikanan berlangsung baik. Namun, seiring dengan kerusakan ekosistem pesisir, usaha perikanan menemui jumlah penurunan tangkap. Dinas perikanan kabupaten Banggai Laut menyatakan bahwa jumlah tangkapan ikan 5 tahun terakhir mengalami 15% penurunan akibat kerusakan ekosistem penting di pesisir dan laut di sekitar pulau Bangkurung.

POSDAYA Mutiara, salah satu kelompok binaan DKP Banggai Laut menyatakan bahwa penurunan tangkapan ikan di wilayah pesisir desa Bone Bone dan desa lain di pulau Bangkurung terjadi akibat kerusakan ekosistem pesisir. Dilaporkan oleh POSDAYA Mutiara, kerusakan telah mencapai 43% terumbu karang dari total luasan terumbu karang yang terdapat di pulau Bangkurung.

Meskipun KKLD telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, namun tidak berkontribusi terhadap upaya menekan laju kerusakan ekosistem Terumbu Karang di pesisir desa Bone Bone. Hasil assesment yang dilakukan oleh SIKAP Institute pada September 2016, menemukan bahwa masalah utama laju kerusakan Terumbu Karang akibat praktek Destruktif Fishing dengan menggunakan bom dan racun ikan, Overfishing dari kapal kapal skala besar dari luar desa dan meningkatnya sedimentasi yang bersumber dari wilayah pertanian di daratan.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove terhadap keseimbangan ekosistem pesisir dan rendahnya kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam mengembangkan wilayah penting terhadap ekosistem pesisir menjadi menjadi akar kerusakan ekosistem pesisir di desa Bone Bone.

Olehnya, SIKAP Institute mencoba menyusun skema project untuk mendorong lahirnya inisiatif pengelolaan dan perlindungan pesisir di desa Bone Bone melalui inisiatif penetapan DPL bersama masyarakat dan pemerintah desa secara partisipatif. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan dan perlindungan Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove sebagai sebagai ekosistem kunci pada wilayah pesisir desa.

B. Apakah dampak yang dapat diharapkan dari pelaksanaan proyek ini bagi:

Jelaskan untuk masing-masing huruf maksimal 100 kata.

a. Jenis-jenis prioritas yang terdapat di dalam KBA

Berbagai jenis prioritas di perairan Peling Banggai dan kelestarian keanekaragamanhayati merupakan dampak yang akan dicapai dalam perlindungan Species terancam punah di area ini. Perairan Peling Banggai merupakan jalur perlintasan beberapa jenis paus, lokasi mencari makan duyung *Dugon dugon*, lokasi peneluran beberapa penyu termasuk penyu sisik *Eretmochelys imbricata* yang berstatus kritis (CR), serta tentunya lokasi ini merupakan kumpulan terumbu karang sebagai habitat ratusan karang, teripang, dan ikan laut terancam punah, termasuk di dalamnya ikan endemis Kepulauan Banggai, yaitu kardinal banggai *Pterapogon kauderni* yang berstatus rentan (VU). Proyek ini berdampak pada penurunan 30% tingkat ancaman pada species prioritas hingga pada tingkat yang tidak membahayakan.

b. Pengelolaan KBA yang lebih baik

Proyek ini mendukung proses penetapan 60% luas dari total pesisir desa untuk ditetapkan sebagai area rencana pembentukan kawasan konservasi laut di KBA Peling Banggai melalui proses tahapan identifikasi, perumusan dan penyepakatan ditetapkannya polygon Daerah Perlindungan Laut di pesisir desa Bone Bone secara partisipatif.

c. Masyarakat di sekitar KBA dan para pihak terkait lainnya

Proyek ini mendukung peningkatan 80% kesadaran masyarakat desa Bone Bone terhadap upaya pembentukan kawasan konservasi laut dan didukung dengan proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi, merumuskan dan menetapkan rencana DPL. Secara tidak langsung, proyek ini juga menjadi meningkatnya sumber pendapatan nelayan dengan adanya penetapan DPL.

C. Pendekatan Proyek:

C.1 Tujuan Proyek

Menjelaskan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh proyek ini, maksimal 50 kata. Tujuan proyek harus berorientasi pada penyelesaian masalah yang telah dinyatakan dalam Alasan Proyek.

Mendukung identifikasi pembentukan kawasan teresterial dan pesisir KBA Peling Banggai di desa Bone Bone melalui perumusan dan penyepakatan pembentukan *Daerah Perlindungan Laut* (DPL) dan komitmen perencanaan Tata Guna Lahan (TGL) dalam menemukan model pengelolaan bentang alam darat dan laut dalam satu kesatuan (*ridge to reef*) dari ekosistem Mangrove, Lamun dan Terumbu karang secara lestari dan berkelanjutan.

C.2 Keluaran Proyek:

Merupakan jawaban atas akar-akar masalah yang diidentifikasi dalam Alasan Proyek.

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan tentang pentingnya jenis prioritas, ekosistem pesisir mulai dari terumbu karang, lamun dan mangrove, yang ditunjukkan dengan berkurangnya aktivitas yang menimbulkan kerusakan ekosistem daratan dan perairan.

2. Warga desa menyepakati upaya perlindungan ekosistem pesisir dengan ditetapkannya polygon DPL melalui tahapan kajian ekosistem, komunikasi dan konsultasi partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah desa.
3. Kelompok pengelola daerah perlindungan laut dan pesisir Desa Bone Bone dibentuk secara demokratis dan memiliki rencana pengelolaan DPL

C.3 Aktivitas Proyek:

Aktivitas-aktivitas proyek merupakan sarana untuk mewujudkan keluaran-keluaran (output) proyek.

<p>Keluaran 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan tentang pentingnya jenis prioritas, ekosistem pesisir mulai dari terumbu karang, lamun dan mangrove, yang ditunjukkan dengan berkurangnya aktivitas yang menimbulkan kerusakan ekosistem daratan dan perairan.</p>	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assesment sosial ekonomi dan sosialisasi program 2. Baseline dan end-line survey KAP 3. Kampanye penyadartahuan tentang jenis prioritas dan ekosistem pesisir bagi warga dan pemerintah desa. 4. Seri diskusi kampung dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat di terkait jenis prioritas dan ekosistem pesisir. 5. Sharing Pembelajaran Pelaksanaan DPL melalui Seri pemutaran film. 6. Desiminasi penetapan DPL melalui Papan informasi (<i>Signboard</i>).
<p>Keluaran 2 Warga desa menyepakati upaya perlindungan ekosistem pesisir dengan ditetapkannya polygon DPL melalui tahapan kajian ekosistem, komunikasi dan konsultasi partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah desa.</p>	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian ekologi, sosial dan ekonomi dasar sebagai rujukan perumusan penetapan DPL. 2. Lokalatih survey dan monitoring tiga ekologi pesisir bagi warga dan pemerintah desa 3. FGD hasil survey sosial ekonomi dan survey ekologi dengan warga desa, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa 4. Penyusunan peta daerah perlindungan laut Desa. 5. Pembahasan dan penetapan daerah perlindungan laut di Desa 6. Diskusi Kampung Integrasi Rencana Pengelolaan DPL kedalam dokumen RPJMDes/RKPDes.
<p>Keluaran 3 Kelompok pengelola daerah perlindungan laut dan pesisir Desa Bone Bone dibentuk secara demokratis dan memiliki rencana pengelolaan DPL</p>	<p>Aktivitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah desa peyusunan AD ART dan pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut - Desa Bone Bone. 2. Penyusunan rencana pengelolaan DPL Desa Bone Bone antara Kelompok Pengelola DPL bersama masyarakat dan pemerintah desa. 3. Workshop para pihak sinergi program

	<p>Kelompok DPL dengan kebijakan/program OPD terkait.</p> <p>4. Monitoring daerah perlindungan laut yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola DPL dan pemerintah Kabupaten (instansi terkait)</p>
--	--

C.4 Strategi, metode, dan perangkat pelaksanaan

Menjelaskan cara bagaimana aktivitas-aktivitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan proyek, termasuk semua jenis perangkat (tools), metode, maupun analisis yang digunakan dalam pengorganisasian, kampanye, advokasi, riset dan aksi lapangan, pelatihan dan lain-lain. Lampirkan metode dan perangkat baku yang telah sering digunakan, atau laporan dari aktivitas serupa yang pernah dijalankan lembaga.

1. Output 1

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jenis prioritas, ekosistem terumbu karang dan pesisir di Desa Bone bone, yang ditunjukkan oleh dikurangnya perburuan jenis prioritas, serta perilaku yang merusak ekosistem terumbu karang, padang lamun dan pesisir. Untuk mencapai output tersebut dilakukan beberapa aktivitas diantaranya sebagai berikut:

1.1. Assesment sosial ekonomi dan sosialisasi program

Assesment dilakukan untuk mengetahui feedback/pembelajaran terhadap pelaksanaan proyek untuk menemu kenali kondisi sosial ekonomi yang ada. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyampaikan kepada warga dan Pemerintah Desa mengenai program pelestarian jenis prioritas, ekosistem terumbu karang dan pesisir di Desa Bone bone serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyampaian informasi ini untuk mendapatkan persetujuan/dukungan warga, pemerintahan desa dan Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait.

1.2. Baseline dan endline survey KAP

Bertujuan untuk mengumpulkan data awal dan akhir yang relevan dengan indikator kunci yang ditetapkan yaitu tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan ekosistem di Desa Bone Bone.

1.3. Kampanye penyadartahuan tentang jenis prioritas dan ekosistem pesisir bagi warga dan pemerintah desa.

Kampanye ini dilakukan bertujuan membangun kesadaran dan pengetahuan warga terhadap pentingnya menjaga jenis prioritas dan ekosistem pesisir dengan menggunakan hasil survei baseline sebagai acuan dalam melakukan kampanye yang akan dilakukan di tingkat warga. Kampanye dilakukan oleh pengelola program dan sedapat mungkin bisa pula mengajak dan menemu kenali beberapa warga untuk bisa bergabung sebagai voulenteer dalam aksi-aksi kampanye.

- 1.4. Seri diskusi kampung dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat di terkait jenis prioritas dan ekosistem pesisir.

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dengan metode seri diskusi dengan melibatkan partisipan dari semua unsur perwakilan masyarakat di desa Bone bone dengan tema diskusi berbeda-beda dalam setiap sesi diskusi diantaranya fungsi dan tata guna lahan, sosial ekonomi, jenis prioritas dan ekosistem pesisir yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan diharapkan mampu mengimplementasikan dengan tindakan nyata.

- 1.5. Sharing Pembelajaran Pelaksanaan DPL melalui Seri pemutaran film.

Kegiatan ini memperlihatkan keberhasilan penetapan DPL yang telah berjalan, ini dimaksudkan masyarakat Desa Bone bone khususnya yang terkena dampak lebih memahami perlindungan ekosistem melalui DPL sehingga diharapkan mampu mengurangi resistensi masyarakat terhadap DPL

- 1.6. Desiminasi penetapan DPL melalui Papan

Desiminasi ini dilakukan melalui pembuatan papan informasi tentang DPL Desa Bone bone. Papan informasi yang dimaksud berjumlah 6 yang kemudian diletakan di masing-masing dusun (3 dusun), batas desa dan dermaga desa, Papan informasi ini berisi tentang aturan dan informasi zona DPL

Output 2

Daerah perlindungan laut dan pesisir di Desa Bone bone terbentuk didukung oleh kajian sosial dan ekologi serta proses yang partisipatif

Untuk mendukung pencapaian output dua ini maka dilakukan beberapa aktivitas diantaranya yakni :

- 2.1. Kajian ekologi, sosial dan ekonomi dasar sebagai ujukan perumusan penetapan DPL.

Kajian ekologi sosial-ekonomi ini sebagai bahan untuk mengumpulkan informasi dalam meningkatkan pemahaman tentang sistem pengelolaan sumberdaya lokal, penggunaan sumberdaya dan kepentingan relatif masing-masing untuk rumah tangga dan desa. Kajian juga memberikan informasi tentang interaksi antara sistem pengambilan keputusan oleh pemerintah, trend persepsi masyarakat dan isu-isu prioritas, dan pengetahuan tentang lembaga berbasis masyarakat dan peran mereka dalam pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi sumberdaya alam. Penggunaan survei merupakan langkah awal yang penting dalam melibatkan masyarakat lokal dan memastikan bahwa suara-suara lokal didengar dan bahwa hubungan masyarakat dengan sumber daya, akses dan hak dimasukkan dalam proses perencanaan kolaboratif. Kegiatan ini akan melibatkan Pengelola Program dan Akademisi di Universitas dibantu oleh masyarakat setempat sebagai tim analisa hasil survey.

- 2.2. Lokalatih survey dan monitoring tiga ekologi pesisir bagi warga dan pemerintah desa.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran awal aktor dan peningkatan kapasitas bagi warga dan pemerintah Desa Bone bone yang diharapkan mampu melibatkan diri dalam proses survei dan monitoring ekologi di Desa Bone bone.

- 2.3. FGD hasil survey sosial ekonomi dan survey ekologi dengan warga desa, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui informasi hasil kajian yang dilakukan sebagai dasar pembentukan DPL. Hasil kajian ini juga akan disampaikan kepada Pemerintah daerah khususnya instansi terkait sebagai bahan perencanaan perlindungan 3 (tiga) ekologi meliputi Mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- 2.4. Penyusunan peta daerah perlindungan laut Desa.
Aktivitas ini merupakan hal yang terpenting dalam menentukan zonasi wilayah perlindungan laut di Desa Bone bone dengan melibatkan masyarakat dalam pemetaan partisipatif berdasarkan hasil survei ekologi ekosistem yang telah dilakukan sebelumnya.
- 2.5. Pembahasan dan penetapan daerah perlindungan laut di Desa
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media konsultasi untuk menyampaikan hasil pemetaan poligon wilayah Daerah Perlindungan Laut di Desa Bone bone yang menjadi bahan atau referensi untuk pembahasan dan penetapan DPL dengan melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat lainnya.
- 2.6. Diskusi Kampung Integrasi Rencana Pengelolaan DPL kedalam dokumen RPJMDes/RKPDes.
Kegiatan ini merupakan langkah keberlanjutan dari hasil penetapan DPL yang akan didiskusikan di tingkat pemerintah desa sebagai langkah yang ditempuh untuk memasukkan/mereview DPL dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bone bone

Output 3

Kelompok pengelola daerah perlindungan laut Desa Bone bone dibentuk secara demokratis dan memiliki rencana pengelolaan:

- 3.1. Musyawarah desa penyusunan AD ART dan pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut - Desa Bone Bone.
Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk mekanisme kerja Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut yang berfungsi sebagai dasar pengambilan sumber peraturan/hukum dalam konteks kelembagaan Pengelola Daerah Perlindungan Laut dengan melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat sebagai upaya menciptakan demokratisasi di desa dalam pengambilan keputusan untuk ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama.
- 3.2. Penyusunan rencana pengelolaan DPL Desa Bone Bone antara Kelompok Pengelola DPL bersama masyarakat dan pemerintah desa.
Kegiatan ini meliputi beberapa hal antara lain untuk menyusun agenda kerja, pembagian kerja, wewenang, pertanggung jawaban atas kegiatan pengawasan
- 3.3. Workshop para pihak sinergi program Kelompok DPL dengan kebijakan/program OPD terkait.
Sebanyak 20 orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah desa, kelompok pengelola Daerah Perlindungan Laut dan OPD terkait mengetahui terbentuknya DPL Desa Bone Bone dan melakukan integrasi dalam perencanaan terhadap ekosistem pesisir dalam program kerja daerah

3.4. Monitoring daerah perlindungan laut yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola DPL dan pemerintah Kabupaten (instansi terkait)
Kegiatan ini merupakan sebagai langkah dan upaya untuk mengawasi daerah perlindungan laut yang telah ditetapkan dan memiliki rencana pengelolaan oleh kelompok sehingga bisa termonitoring dengan baik dan akan menjadi bahan evaluasi terkait upaya pengembangan, pengawasan dan pemanfaatannya termasuk mengimplementasikan rencana pengelolaannya

Strategi dan Keberlanjutan Proyek

Kaitan dengan Strategi Investasi CEPF:

Terangkan kaitan antara proyek Anda dengan strategi investasi CEPF yang disajikan dalam Profil Ekosistem Wallacea. Jawaban hendaknya mengulas kaitan dengan arahan strategis dan prioritas investasi di dalam Profil Ekosistem Wallacea.

Rusaknya ekosistem di KBA Labobo Bangkuring disebabkan oleh banyak faktor dalam pemanfaatan dan pengelolannya. Untuk itu, perlu berbagai upaya strategis untuk mengurangi kerusakan sekaligus memperbaiki kualitas sumberdaya penghidupan di KBA Labobo Bangkuring. Dan sebagai upaya prioritas yang perlu dilakukan untuk mengintervensinya adalah dengan menggunakan arahan strategis 4 (empat) yaitu memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi jenis dan kawasan laut

Mitra kerja (*stakeholders*) dalam Proyek:

Tuliskan setiap mitra yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek ini serta para pihak lain yang akan berperan penting dalam pelaksanaan Proyek. Proyek sebaiknya dirancang untuk bersinergi dengan program sejenis dari pemerintah dan atau lembaga lain, sehingga berpotensi menghasilkan dampak yang lebih nyata.

Nama Mitra Kerja	Peran Mitra dalam Proyek ini
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Laut	Sebagai perumus kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan terkait pembinaan dan fasilitasi dibidang kelautan dan perikanan di kabupaten Banggai Laut
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut	Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor
- Posdaya Mutiara	Mitra lokal dalam proses membangun kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan ekosistem
- Pemerintah Desa Bone bone	Sebagai stakeholder kunci dalam rencana penetapan daerah perlindungan laut
- Pemerintah Desa yang berbatasan pada locus program yaitu : Pemerintah Desa Kalupapi dan Desa Lantibung	Sebagai stakeholder pendukung maka pemerintah desa Kalupapi dan desa Lantibung kiranya dapat membantu mendorong kesadaran masyarakatnya untuk dapat menghormati dan menghargai aturan daerah perlindungan laut yang ditetapkan.

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial:

Bagaimana peranan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan yang diusulkan (dengan memfokuskan pada kebutuhan perempuan)? Bagaimana strategi Anda agar kegiatan ini dapat memberikan dampak pada semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal.

Kegiatan dilakukan dengan melibatkan representase dari perempuan desa, dalam proses diskusi maupun pembentukan struktur pengelola DPL. Dampak tidak langsung dari kegiatan pemboman maupun pengrusakan hutan mangrove adalah berkurangnya hasil penangkapan perikanan. Situasi domestik tersebut akan dirasakan oleh perempuan sebagai pengelola rumah tangga masyarakat pesisir.

Rencana keberlanjutan:

Jelaskan bagaimana strategi Anda agar bagian-bagian dari proyek ini atau hasil-hasilnya dapat dilanjutkan atau direplikasi setelah berakhirnya proyek baik oleh lembaga Anda sendiri maupun pihak lain.

Strategi pengelolaan perairan dan pesisir tidak terlepas juga dengan mengelolah di bagian hulu pulau bangkurung atau di bagian hutan sebagai daerah penyangga. Meningkatnya kapasitas masyarakat sebagai arahan pengembangan strategi agar pengetahuan masyarakat di Desa Bone bone dapat meningkat seiring dengan berjalannya proyek.

Masyarakat dapat menemu kenali kapasitas mereka dalam merekam kegiatan dan di sesuaikan dengan kondisi realitas di pesisir Desa Bone bone sebelum adanya proyek dan pasca proyek berakhir. Sikap Institut bersama kelompok masyarakat, pemerintahan desa dilibatkan dalam mengelola pesisir dengan target adanya Daerah Perlindungan Laut (DPL).

Keberlanjutan proyek yakni memaksimalkan peta DPL yaitu dibangun kesepakatan rencana program DPL, tim pelaksana program DPL terdiri dari 15 orang. Pada akhir program peta DPL yang telah disepakati dikampanyekan di internalisasi dengan secara keseluruhan masyarakat desa Bone bone dengan membagikan koran kampung maupun Papan informasi desa yang di pasang di beberapa posisi strategis di desa Bone-bone. Juga hasil DPL Desa Bone bone di sebar di media You tube, maupun media sosial lainnya.

Harapannya kegiatan berjalan berkesinambungan dan bersinergi dengan program yang dilakukan dengan pemerintah daerah sehingga mampu mendukung terlindunginya KKLD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bagi manajemen Sikap Institute pada akhir program di evaluasi dan monitoring maupun di survey kembali apa yang dapat dirasakan masyarakat dalam mengelola pesisir dan perairan Desa Bone bone. Kegiatan dapat di replikasi dengan desa lainnya di kawasan pulau Bangkurung maupun desa lainnya.

Lampiran: *Logical Framework Analysis*

Pastikan bahwa pernyataan Judul, Tujuan Proyek, Keluaran, dan Aktivitas sama seperti yang tertulis dalam badan Proposal.

Judul proyek:

Perlindungan Ekosistem Wallacea Melalui Perencanaan Daerah Perlindungan Laut yang Berbasis Masyarakat, Adil dan Berkelanjutan

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
<p>Goal (tujuan jangka panjang): Meningkatnya perekonomian Masyarakat Petani dan Nelayan yang Berkelanjutan melalui keanekaragaman Hayati yang terjaga dengan skema Daerah Perlindungan Laut</p>	<p>Pengelolaan DPL tetap terjaga dalam meningkatkan kelestarian sumberdaya ekosistem darat dan perairan. Dalam upaya keseimbangan antara lingkungan dan ekonomi masyarakat deda Bone bone</p>	<p>Komunikasi berkelanjutan dan menjaga kesepakatan bersama antar Sikap Institute dengan kelompok pengelola DPL dan pemerintah Desa Bone bone.</p>	
<p>Objective/outcome (tujuan proyek): Mendukung identifikasi pembentukan kawasan teresterial dan pesisir KBA Peling Banggai di desa Bone Bone melalui perumusan dan penyepakatan pembentukan <i>Daerah Perlindungan Laut</i> (DPL) dan komitmen perencanaan Tata Guna Lahan (TGL) dalam menemukan model pengelolaan bentang alam darat dan laut dalam satu kesatuan (<i>ridge</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Species terancam punah seperti jenis paus, <i>Dugon dugon</i>, penyu sisik <i>Eretmochelys imbricata</i>, kardinal banggai <i>Pterapogon</i> dan beberapa jenis terumbu karang, teripang, dan ikan laut mengalami penurunan tingkat keterancamannya 30% tingkat ancaman pada akhir project. <ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi 60% total dari luasan ekosistem pesisir desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Kajian Ekology 2. Peta Poligon DPL 3. Dokumen Kesepakatan Integrasi Program DPL ke dalam review RPJMDes/ Program OPD 	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
<i>to reef</i>) dari ekosistem Mangrove, Lamun dan Terumbu karang secara lestari dan berkelanjutan.	<p>Bone Bone yang direncanakan untuk ditetapkan sebagai polygon Daerah Perlindungan Laut di pesisir desa Bone Bone secara partisipatif.</p> <p>2. Meningkatnya 80% kesadaran masyarakat dalam mendukung penetapan rencana pengelolaan DPL yang terintegrasi rencana pengelolaan ke dalam RPJMDes dan mendapatkan dukungan dari OPD terkait.</p>		
<p>Output (keluaran/tujuan jangka pendek) 1: Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan tentang pentingnya jenis prioritas, ekosistem pesisir mulai dari terumbu karang, lamun dan mangrove, yang ditunjukkan dengan berkurangnya aktivitas yang menimbulkan kerusakan ekosistem daratan dan perairan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran warga tentang pentingnya kelestarian ekosistem darat dan laut ▪ Meningkatnya dukungan inisiatif perlindungan kawasan pesisir ▪ Menurunnya praktek Pengelolaan SDA pesisir yang mengancam ekosistem penting. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Survey KAP (baseline and endlines) 	
Aktivitas:			

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
1.1. Assesment sosial ekonomi dan sosialisasi program	Pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah (ODP) terkait menerima informasi pelaksanaan program. Dilakukan pada awal program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar Hadir ▪ Dokumentasi Foto 	
1.2. Baseline dan endline survey KAP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya tim survei ▪ Tim survei menghasilkan sebuah informasi awal terkait tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan ekosistem di Desa Bone bone kajian awal mengenai pengetahuan yang dilakukan pada awal program selama 1 bulan kerja dan survei akhir sebelum akhir program atau dua bulan sebelum program berakhir. Bulan III Minggu II 	Dokumen survey baseline dan endline	
1.3. Kampanye penyadartahuan tentang jenis prioritas dan ekosistem pesisir bagi warga dan pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebanyak 60 warga dan 10 staf pemerintah desa mendapat penyadartahuan melalui kampanye yang dilakukan oleh pengelola program dan beberapa warga yang sdh terlibat dalam aktivitas sebelumnya. 	Laporan ringkas Kampanye penyadartahuan tentang jenis prioritas dan ekosistem pesisir bagi warga dan pemerintah desa Bone Bone	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
1.4. Seri diskusi kampung dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat di Desa Bone bone terkait jenis prioritas dan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 orang warga desa telah mengikuti seri diskusi peningkatan pengetahuan ▪ Pengetahuan tentang aspek penting keanekaragaman hayati dan sosio ekonomi jenis prioritas dan ekosistem pesisir dipahami oleh 20 orang warga desa peserta workshop 	Laporan teknis seri diskusi kampung dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat di Desa Bone Bone terkait jenis prioritas dan pesisir.	
1.5. Sharing Pembelajaran Pelaksanaan DPL melalui Seri pemutaran film	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan memperlihatkan film dokumenter terhadap keberhasilan penerapan DPL sehingga meminimalisir resistensi terhadap penetapan DPL ▪ 80% masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat penetapan DPL di Desa Bone bone 	Dokumentasi	
1.6. Desiminasi Daerah Perlindungan Laut Desa Bone Bone melalui papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebanyak 5 papan informasi DPL dibuat dan diletakan di masing-masing dusun (3 Dusun), di batas desa dan dermaga 	Dokumentasi pemasangan papan informasi	
<p>Output (keluaran/tujuan jangka pendek) 2:</p> <p>Warga desa menyepakati upaya perlindungan ekosistem pesisir dengan ditetapkannya polygon DPL melalui tahapan kajian ekosistem, komunikasi dan konsultasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dokumen hasil kajian ekologis dan sosio ekonomi dalam pembentukan DPL. ▪ Masyarakat menyepakati pembentukan DPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Absen dan dokumentasi keterlibatan warga desa dalam pembentukan DPL. 2. Sketsa peta DPL 	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pengurus DPL yang di pilih melalui musyawarah desa ▪ Masyarakat terlibat secara partisipatif dalam membuat peta DPL berdasarkan kondisi realitas ▪ Adanya data Potensi sumberdaya pesisir yakni tutupan mangrove, padang lamun, kondisi terumbu karang. 		
Aktivitas:			
2.1. Kajian ekologi sosial dan ekonomi dasar sebagai ujukan perumusan penetapan DPL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim studi berjumlah 2 orang yang terdiri dari akademisi dan 2 orang masyarakat. 	Dokumen hasil studi	
2.2. Lokalatih survey dan monitoring ekologi bagi warga dan pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebanyak 10 warga dan 3 staf pemerintah desa memahami hal penting serta teknik survei dan monitoring ekologi 	Laporan teknis lokalatih survei dan monitoring ekologi bagi warga dan pemerintah desa	
2.3. FGD hasil kajian sosial ekonomi dan survey ekologi dengan warga desa, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebanyak 13 orang tergabung dalam tim survey ▪ Tim survei menghasil data dan informasi tentang ekologi ekosistem pesisir Desa Bone bone pada pada bulan VII minggu IV. 	Laporan teknis hasil kajian ekologi sosio ekonomi pesisir di Desa Bone bone	
2.4. Penyusunan peta daerah perlindungan laut Desa Bone bone	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebanyak 5 orang tergabung dalam pemetaan dan penyusunan peta daerah perlindungan laut di Desa Bone bone ▪ Peta Area yang diusulkan sebagai 	Laporan teknis penyusunan Peta daerah perlindungan laut di Desa Bone bone.	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
	DPL disusun pada bulan ke IV		
2.5. Pembahasan dan penetapan daerah perlindungan laut di Desa Bone bone	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebanyak 25 orang masyarakat atas penetapan Daerah Perlindungan Laut di Desa Bone bone ▪ Peta Area yang diusulkan sebagai DPL disusun pada bulan ke IV 	Laporan teknis penyusunan Peta daerah perlindungan laut di Desa Bone bone.	
2.6. Diskusi Kampung Integrasi Rencana Pengeloaan DPL kedalam dokumen RPJMDes/RKPDes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebanyak 6 kali pertemuan dan diikuti 15 orang peserta dari pemerintah desa, pemerintah dan masyarakat serta pengelola program aktif dalam membahas DPL untuk diintegrasikan ke RPJMDes 	Laporan hasil Seri pertemuan dengan pemerintahan desa dan pemerintah kabupaten untuk Integrasi daerah perlindungan laut dengan dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes) serta program/kebijakkan pemerintah kabupaten	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Output 3 Kelompok pengelola daerah perlindungan laut dan pesisir Desa Bone Bone dibentuk secara demokratis dan memiliki rencana pengelolaan DPL	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terlibat dalam pemilihan anggota kelompok dan pembahasan rencana pengelolaan DPL • Anggota kelompok pengelola terdiri dari unsur-unsur: masyarakat terdampak atau berkepentingan langsung, keterwakilan perempuan dan unsur pemerintah desa. • Rencana kelola berisi kegiatan-kegiatan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir tersusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan proses pembentukan kelompok dan pemilihan pengurus/anggota kelompok • Dokumen rencana pengelolaan DPL • Laporan hasil monitoring daerah perlindungan laut 	
Aktivitas			
3.1. Musyawarah desa penyusunan AD ART dan pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut - Desa Bone Bone.	Sebanyak 15 orang yang terdiri dari perwakilan masyarakat, pemerintah desa melakukan musyawarah penyusunan AD ART kelompok Pengelola DPL yang di fasilitasi pengelola program	Laporan hasil Musyawarah desa pembentukan kelompok pengelola daerah perlindungan laut Desa Bone bone	
3.2. Penyusunan rencana pengelolaan daerah perlindungan laut Desa Bone bone	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 7 orang (Kelompok pengelola DPL, Pemerintah Desa dan pengelola Program dan pemerintah kabupaten) tergabung dalam tim penyusunan rencana pengelolaan DPL yang difasilitasi pengelola program. • Terdapat rencana pengelolaan 	Laporan teknis Penyusunan rencana pengelolaan daerah perlindungan laut Desa Bone bone	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
	daerah perlindungan laut Desa Bone bone dan wilayah laut/pesisir Desa Bone bone.		
3.3. Workshop para pihak sinergi program Kelompok DPL dengan kebijakan/program OPD terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Orang perwakilan dari pemerintah desa, kelompok pengelola Daerah Perlindungan Laut dan OPD terkait secara aktif melakukan integrasi dalam perencanaan terhadap ekosistem pesisir dalam program kerja daerah 		
3.4. Monitoring daerah perlindungan laut	Sebanyak 7 orang perwakilan dari (Masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kelompok pengelola DPL dan pengelola program) melakukan monitoring kolaboratif di lokasi DPL di Desa Bone bone	Laporan hasil Monitoring daerah perlindungan laut	